



BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 108 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 83 TAHUN 2022 TENTANG
RENCANA KERJA KECAMATAN CIBATU TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Bupati Garut Nomor 83 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Kecamatan Cibatu Tahun 2023;
- b. bahwa sehubungan adanya perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, maka Peraturan Bupati Garut sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 83 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Kecamatan Cibatu Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 3);

26. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 228 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 228);
27. Peraturan Bupati Garut Nomor 83 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Kecamatan Cibatu Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 83);
28. Peraturan Bupati Garut Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 56);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 83 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA KECAMATAN CIBATU TAHUN 2023.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Garut Nomor 83 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Kecamatan Cibatu Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 83) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 1 - 9 - 2023

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN

Diundangkan di Garut
pada tanggal 1 - 9 - 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

NURDIN YANA

BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2023 NOMOR 108

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 108 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI GARUT NOMOR 83
TAHUN 2022 TENTANG RENCANA
KERJA KECAMATAN CIBATU
TAHUN 2023

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang di tempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat atau sektor swasta lainnya. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan penjabaran tahun ke empat dari Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Cibatu Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 yang penyusunannya harus selaras dan konsisten dengan prioritas, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah. RKPD Tahun 2023 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023. Berdasarkan Pasal 243 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, bahwa Perubahan RKPD dan Perubahan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi :

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih dan atau kurang tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Berdasarkan Pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Perubahan RKPD meliputi Perubahan :

- a. Kerangka ekonomi dan keuangan daerah;
- b. Target sasaran pembangunan daerah;

- c. Prioritas pembangunan daerah;
- d. Penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan Perangkat daerah; dan
- e. Target kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

Perubahan RKPD Tahun 2023 dengan Tema Pembangunan “Peningkatan Pelayanan Publik, Pemerataan Pembangunan dan Daya Saing Daerah serta Penguatan Demokrasi untuk Kesejahteraan Masyarakat” telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD selanjutnya dijadikan dasar penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah dan menjadi pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara untuk penyusunan Perubahan APBD. Bagi Perangkat Daerah Kabupaten Garut, RKPD merupakan pedoman untuk menyempurnakan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) dan penyusunan RKA Perangkat Daerah Tahun 2023.

Muatan perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 agar perlu memperhatikan diantaranya Program dan Kegiatan yang diperlukan serta memberikan dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan yang menjadi prioritas di tahun 2023, Kemampuan keuangan Daerah melalui APBD, mengakomodir pendanaan DAK dan APBD Provinsi, memuat target kinerja yang sudah ditetapkan pada Perubahan Renstra diantaranya Program prioritas, program unggulan, program mendesak dan SPM. Perencanaan perubahan difokuskan pada pergeseran pagu kegiatan, sub kegiatan dan kode rekening belanja, perubahan target kinerja, pagu kegiatan serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)

- sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011

- tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 3);
 30. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 228 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun

2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 228);

31. Peraturan Bupati Garut Nomor 0000 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Badan/Dinas/Kecamatan Cibatu Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 0000);

32. Peraturan Bupati Garut Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 36).

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Cibatu ini disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar PD yang sesuai dengan RKPD serta mewujudkan pencapaian target dan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah. Guna menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, maka perlu dilakukan perubahan Renja PD Tahun 2023.

2. Tujuan

Adapun tujuan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Cibatu Tahun 2023, yaitu :

- a. Mewujudkan konsistensi antara capaian tujuan Renstra dengan tujuan perencanaan dan penganggaran Tahunan.
- b. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan.
- c. Menjadi pedoman pengendalian program dan kegiatan Prioritas tahun 2023.
- d. Sebagai bahan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi penyelenggaraan kegiatan perangkat Daerah

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENCANA KERJA PD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Cibatu sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 dan Capaian Renstra

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

2.4 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada Bab ini memuat Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pemerintahan Daerah serta Prioritas Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2023 yang diselaraskan dengan tugas dan fungsi, Tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah serta Program, Kegiatan dan Sub kegiatan, lokasi serta sasaran perubahan kelompok penerima manfaat, dan pagu perubahan renja tahun 2023.

3.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Sebelum dan Sesudah Perubahan

3.2 Perubahan Rencana Kerja Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Semula dan Menjadi

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Cibatu sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 dan Capaian Renstra

Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan rencana pembangunan pada prinsipnya dilakukan untuk mengukur capaian target kinerja dan daya serap anggaran. Evaluasi Rencana Kerja dilakukan untuk mengetahui hasil pelaksanaan Renstra dan RKPD, berdasarkan pagu dan realisasi Renstra serta RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, serta rata-rata capaian Renstra sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 dan rata-rata capaian Renja pada Triwulan II Tahun 2023.

Konsistensi RKPD dan APBD akan berdampak pada jumlah realisasi anggaran. Program/kegiatan yang tidak tercantum dalam RKPD tidak menjadi capaian RKPD atau Renja. Oleh karena itu, apabila masih ada inkonsistensi program/kegiatan antara perencanaan dan penganggaran, maka realisasi anggaran dokumen rencana akan menjadi tidak sama dengan jumlah realisasi dokumen anggaran. Untuk mengetahui informasi dimaksud, juga dimuat persandingan antara realisasi anggaran RKPD dan APBD.

Selengkapnya hasil evaluasi rencana strategis dan rencana tahunan Kecamatan Cibatu Kabupaten Garut Tahun 2023 disajikan sebagai berikut:

2.1.1. Realisasi Anggaran Program Renstra

Realisasi anggaran Renstra merupakan akumulasi realisasi anggaran tahunan dalam Renja. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemantauan dan supervisi untuk memastikan bahwa visi dan misi RPJMD dapat diwujudkan. Realisasi anggaran Renstra Kabupaten Garut sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Perbandingan Pagu Indikatif dan Realisasi Anggaran Program
Renstra Kecamatan Cibatu Kabupaten Garut Tahun 2019-2024
Sampai Triwulan II Tahun 2023

Urusan dan Program	Pagu Indikatif Renstra Tahun 2023	% Realisasi Renstra Tahun 2023	Realisasi APBD TW II Tahun 2023
1	2	3	4
I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.413.549.521	42,24	1.019.662.161
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	48.525.736	36,01	17.476.200
Penyusunan Dokumen Perencanaan Prangkat Daerah	42.725.736	36,01	17.476.200
Koordinasi dan Penyusunan dokumen RKA-SKPD	500.000	0	0
Koordinasi dan Penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	500.000	0	0
Koordinasi dan Penyusunan dokumen DPA-SKPD	500.000	0	0
Koordinasi dan Penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	500.000	0	0
Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	500.000	0	0
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.300.000	0	0
Administrasi Keuangan Prangkat Derah	1.999.398.254	42,12	842.243.107
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.993.953.254	42,12	842.243.107
Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	5.445.000	0	0
Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	37.345.000	47,27	17.653.500
Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	17.545.000	47,27	17.653.500
Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	18.000.000	0	0
Administrasi Umum Perangkat Derah	212.543.775	54,98	116.876.613
Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	11.804.276	24,99	2.950.500
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	125.041.800	69,36	86.741.400
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.372.000	61,32	5.747.400
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	27.794.184	26,08	7.249.363

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.807.153	37,19	3.647.950
Fasilitas Kunjungan Tamu	38.720.000	16,01	6.200.000
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	54.159.600	8,01	4.340.000
Penatausahaan arsip dinamis SKPD	4.015.000	0	0
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	63.259.817	16,31	10.321.045
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	27.780.390	22,50	6.252.045
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.921.200	47,96	3.320.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	28.558.227	26,18	7.479.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	52.476.939	37,52	19.691.700
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	29.512.100	17,59	5.191.700
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	22.964.839	63,14	14.500.000
II. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	261.652.336	10,24	26.799.000
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat kecamatan	209.453.662	2,13	4.480.000
Peningkatan Efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan	209.453.662	2,13	4.480.000
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada dikecamatan	43.979.000	50,74	22.319.000
Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan	43.979.000	50,74	22.319.000
III. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	30.314.790	23,83	7.255.900
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	9.810.000	2,30	2.262.500
Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	9.810.000	2,30	2.262.500
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	14.880.580	33,55	4.993.400
Peningkatan Kapasitas lembaga kemasyarakatan	14.880.580	33,55	4.993.400
Koordinasi dan sinkronisasi pemberlakuan pembatasan	14.224.000	0	0

kegiatan masyarakat (PPKM)			
Penanganan Covid-19 tingkat desa dan kelurahan	14.224.000	0	0
IV. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	177.414.369	57,28	101.640.000
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	177.364.369	57,28	101.640.000
Sinergitas dengan Kepolisian Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	116.364.369	49,29	57.360.000
Harmonisasi dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	61.050.000	72,53	44.280.000
V. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	292.000.000	33,95	99.150.000
Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	292.000.000	33,95	99.150.000
Fasilitasi Koordinasi dan pembinaan (bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	92.000.000	0	0
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	200.000.000	33,95	99.150.000
VI. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	37.710.195	62,13	23.431.421
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan	37.710.195	62,13	23.431.421
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset desa	8.720.000	43,21	3.768.200
Fasilitasi Penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan	13.381.995	47,82	6.400.000
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	7.780.000	69,58	5.435.021
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	7.828.200	100	7.828.200
Jumlah	2.679.015.519	47,78	1.280.242.286

Sumber : Perubahan RENSTRA KECAMATAN Tahun 2019-2024 dan pengolahan data LRA APBD 2023

Dari tabel diatas, menggambarkan perbandingan pagu indikatif Renstra Tahun 2023 terhadap realisasi APBD TA. 2023, dari total pagu indikatif Renstra Tahun 2023 sebesar Rp. 2.679.015.519, melalui program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam Renja Tahun 2022 dalam pelaksanaannya pada APBD TA. 2023, sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 dapat direalisasikan sebesar Rp. 1.280.242.286 atau sebesar 47,78%.

2.1.2. Tingkat Capaian Kinerja Program RENSTRA

Capaian Renstra merupakan hasil pelaksanaan Renja setiap tahun. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemantauan dan supervisi untuk memastikan rencana program RENSTRA dapat diwujudkan. Berdasarkan data hasil evaluasi Renja Tahun 2023, diperoleh rata-rata tingkat capaian RENSTRA s.d. Triwulan II Tahun 2023 adalah 28,05% untuk target kinerja dan 47,78% untuk target anggaran.

Tabel 2.2
Rata-Rata Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran Program
RENSTRA Kabupaten Garut Tahun 2019-2024
Sampai Triwulan II Tahun 2023

Urusan dan Program	Rata-rata Tingkat Capaian RENSTRA s/d Tahun 2023 (%)	
	Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)
1	2	3
I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	42,24	18,12
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	36,01	12,03
Penyusunan Dokumen Perencanaan Prangkat Daerah	36,01	12,03
Koordinasi dan Penyusunan dokumen RKA-SKPD	0	0,0
Koordinasi dan Penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	0	0,0
Koordinasi dan Penyusunan dokumen DPA-SKPD	0	0,0
Koordinasi dan Penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	0	0,0
Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	0	0,0
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	0,0
Administrasi Keuangan Prangkat Daerah	42,12	14,04
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	42,12	14,04
Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	0	0,0
Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	47,27	15,75
Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	47,27	15,75
Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	0	0,0
Administrasi Umum Perangkat Daerah	54,98	18,32
Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	24,99	8,33
Penyediaan Peralatan dan	69,36	8,33

Perlengkapan Kantor		
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	61,32	20,44
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	26,08	8,69
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	37,19	12,39
Fasilitasi Kunjungan Tamu	16,01	5,33
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	8,01	2,67
Penatausahaan arsip dinamis SKPD	0	0,0
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	16,31	5,43
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	22,50	7,5
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	47,96	15,98
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	26,18	8,72
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	37,52	12,50
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	17,59	5,86
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	63,14	21,04
II. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	10,24	6,01
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat kecamatan	2,13	0,71
Peningkatan Efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan	2,13	0,71
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada dikecamatan	50,74	16,91
Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan	50,74	16,91
III. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	23,83	7,48
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	2,30	0,76
Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	2,30	0,76
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	33,55	11,18
Peningkatan Kapasitas lembaga kemasyarakatan	33,55	11,18
Koordinasi dan sinkronisasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM)	0	0,0
Penanganan Covid-19 tingkat desa dan kelurahan	0	0,0
IV. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban	57,28	21,15

Umum		
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	57,28	21,15
Sinergitas dengan Kepolisian Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	49,29	16,43
Harmonisasi dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	72,53	24,17
V. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	33,95	11,31
Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	33,95	11,31
Fasilitasi Koordinasi dan pembinaan (bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	0	0,0
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	33,95	11,31
VI. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	62,13	20,71
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan	62,13	20,71
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset desa	43,21	14,40
Fasilitasi Penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan	47,82	15,94
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	69,58	23,19
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	100	33,33
Jumlah	47,78	15,92

Sumber : PERUBAHAN RENSTRA Tahun 2019-2024 dan pengolahan data LRA APBD 2023

2.2 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023

2.2.1. Realisasi Anggaran Program Renja

Realisasi anggaran program Renja merupakan akumulasi realisasi anggaran seluruh kegiatan yang ada dalam Renja. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemantauan dan supervisi untuk memastikan bahwa target dan anggaran Renja dilaksanakan dalam rangka mewujudkan program dalam Renstra. Realisasi anggaran Renja Tahun 2023 sampai Triwulan II adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Perbandingan Pagu Indikatif dan Realisasi Anggaran
RENJA Kecamatan Cibatu Kabupaten Garut Tahun 2023
Sampai Triwulan II Tahun 2023

Nama Urusan dan Program	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)	% Realisasi thd Renja	Realisasi Anggaran Renja yang Dievaluasi (2023)
1	2	3	4
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		54,36	1.021.965.965
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah		44,22	17.476.200
Penyusunan Dokumen Perencanaan Prangkat Daerah	1 Dokumen	47,86	17.476.200
Koordinasi dan Penyusunan dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	0	0
Koordinasi dan Penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	0	0
Koordinasi dan Penyusunan dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	0	0
Koordinasi dan Penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	0	0
Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 Laporan	0	0
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	0	0
Administrasi Keuangan Prangkat Derah		54,84	842.243.107
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14 orang/bulan	55,01	842.243.107
Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 laporan	0	0
Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah		63,37	8.653.500
Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	29 Paket	100	8.653.500
Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	3 orang	0	0
Administrasi Umum Perangkat Derah		60,18	116.850.413
Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 paket	25	2.950.500
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 paket	69,37	86.741.400
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1 paket	100	5.721.200
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 paket	57,38	7.249.363
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 dokumen	48,93	3.647.950
Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 laporan	36,82	6.200.000
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 laporan	40,79	4.340.000
Penatausahaan arsip dinamis SKPD	1 dokumen	0	0
Penyediaan Jasa Penunjang			17.051.045

Nama Urusan dan Program	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)	% Realisasi thd Renja	Realisasi Anggaran Renja yang Dievaluasi (2023)
1	2	3	4
Urusan Pemerintahan Daerah			
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	1 laporan	29,69	6.252.045
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 laporan	50	3.320.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 laporan	27,50	7.479.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		46,87	19.691.700
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	13 unit	18,87	5.191.700
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	3 unit	100	14.500.000
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100	18,03	26.799.000
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat kecamatan		4,28	4.480.000
Peningkatan Efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan	1 dokumen	4,28	4.480.000
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada dikecamatan	100	50,75	22.319.000
Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan	9 dokumen	50,75	22.319.000
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100	22,44	7.255.900
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		27,91	2.262.500
Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	1 laporan	27,91	2.262.500
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		49,93	4.993.400
Peningkatan Kapasitas lembaga kemasyarakatan	260 orang	49,93	4.993.400
Koordinasi dan sinkronisasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM)		0	0
Penanganan Covid-19 tingkat desa dan kelurahan	1 dokumen	0	0
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	63,46	101.640.000
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		63,46	101.640.000
Sinergitas dengan Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 laporan	50,75	57.360.000
Harmonisasi dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 laporan	93,93	44.280.000
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	49,58	99.150.000
Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		49,58	99.150.000

Nama Urusan dan Program	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)	% Realisasi thd Renja	Realisasi Anggaran Renja yang Dievaluasi (2023)
1	2	3	4
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 doklumen	49,58	99.150.000
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	65,49	23.431.421
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan		65,48	23.431.421
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset desa	1 dokumen	100	3.768.200
Fasilitasi Penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan	2 laporan	39,02	6.400.000
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 dokumen	69,86	5.435.021
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1 dokumen	100	7.828.200
JUMLAH			1.280.242.286

Sumber : RKPD Tahun 2023 dan pengolahan data LRA APBD 2023

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh informasi bahwa secara rata-rata, realisasi anggaran Renja pada Triwulan II Tahun 2023 berdasarkan bidang urusan pemerintahan adalah 52,11%. Realisasi Renja sangat dipengaruhi oleh konsistensi kegiatan antara RKPD dengan APBD. Apabila suatu kegiatan dilaksanakan berdasarkan APBD namun kegiatan tersebut tidak ada dalam RKPD, maka realisasi kegiatan tersebut tidak mempengaruhi realisasi RKPD.

2.2.2. Tingkat Capaian Kinerja Program RENJA

Tingkat capaian RENJA diperoleh dari rata-rata realisasi target kinerja dan anggaran seluruh program. Capaian program diperoleh dari rata-rata realisasi target kinerja dan target anggaran dari seluruh kegiatan pada suatu program.

Berdasarkan data pada RENJA Tahun 2023, capaian rata-rata RENJA Kabupaten Garut pada Triwulan II Tahun 2023 adalah 27,82% untuk target kinerja, dan 52,11% untuk target anggaran. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa kendala teknis yang terjadi dalam proses pelaksanaan kegiatan termasuk pengadaan barang dan jasa yang sudah proses masih rendah. Apabila dilihat berdasarkan pelaksanaan bidang urusan, maka rata-rata capaian RENJA dimaksud adalah:

Tabel 2.4
Rata-Rata Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran Program
Renja Kecamatan Cibatu Kabupaten Garut Tahun 2023
Sampai Triwulan II Tahun 2023

Urusan dan Bidang Program	Rata-rata Tingkat Capaian Renja Tahun 2023 (%)	
	Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)
1	2	3
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		54,36
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		18,03
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		22,44
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum		63,46
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		49,58
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		65,49

Sumber : Renja Tahun 2023 dan pengolahan data LRA APBD TA. 2023

Secara rinci evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Cibatu Tahun 2023 dan perkiraan capaian target Renstra Kecamatan Cibatu Tahun 2019-2024 sampai dengan Triwulan II tahun berjalan 2023 tersaji dalam Tabel 2.5 berikut.

Tabel 2. 5 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Kecamatan Cibatu Sampai dengan Tahun 2023 Kabupaten Garut

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Cibatu

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2023 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
7										
	Unsur Kewilayahan									
7	01									
	Kecamatan									
7	01	01								
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD dan Pelaporan Capaian Kinerja dan								

						Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan di badan kesatuan bangsa dan politik								
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah								
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan	5 dokumen	3 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	1 dokumen	100
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD	2 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0	1 dokumen	1 dokumen	100
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD	2 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0	1 dokumen	1 dokumen	100
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-	Jumlah dokumen DPA-	2 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0	1 dokumen	1 dokumen	100

					SKPD	SKPD								
7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD	2 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0	1 dokumen	1 dokumen	100
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan realisasi kinerja SKPD	2 laporan	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0	1 Dokumen	1 Dokumen	100
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Evaluasi kinerja perangkat daerah	4 laporan	2 laporan	1 laporan	1 laporan	100	1 laporan	1 laporan	100
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan akhir tahun								
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN	56 orang/bulan	28 orang/bulan	14 orang/bulan	14 orang/bulan	100	14 orang/bulan	14 orang/bulan	100
7	01	01	2.02	02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen keuangan	4 laporan	2 laporan	1 laporan	1 laporan	100	1 laporan	1 laporan	100

7	01	01	20.5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kepegawaian Perangkat Daerah								
7	01	01	20.5	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah stel pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	58 paket	29 Paket	29 Paket	29 paket	100	29 paket	29paket	100
7	01	01	20.5	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan	12 orang	6 orang	3 orang	3 orang	100	3 orang	3 orang	100
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai								
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah item penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor	4 paket	2 paket	1 paket	1 paket	100	1 paket	1 paket	100
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 paket	2 paket	1 paket	1 paket	100	1 paket	1 paket	100

7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket penyediaan peralatan rumah tangga yang disediakan	4 paket	2 paket	1 paket	1 paket	100	1 paket	1 paket	100
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Cetak dan Penggandaan yang disediakan	4 paket	2 paket	1 paket	1 paket	100	1 paket	1 paket	100
7	01	01	2.06	06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	4 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	1 doklumen	100	1 dokumen	1 dokumen	100
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah pelaksanaan fasilitasi kunjungan tamu	4 laporan	2 laporan	1 laporan	1 laporan	100	1 laporan	1 laporan	100
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pelaksanaanrap at koordinasi dan konsultasi SKPD	4 laporan	21 laporan	1 laporan	1 laporan	100	1 laporan	1 laporan	100
7	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis SKPD	Jumlah laporan Penataan arsip dinamis SKPD	2 laporan	0 laporan	0 laporan	0 laporan	0	1 laporan	1 laporan	100

7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	4 laporan	21 laporan	1 laporan	1 laporan	100	1 laporan	1 laporan	100
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa peralatan kantor dan perlengkapan	4 laporan	2 laporan	1 laporan	1 laporan	100	1 laporan	1 laporan	100
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jenis pelayanan umum kantor	4 laporan	2 laporan	1 laporan	1 laporan	100	1 laporan	1 laporan	100
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan administrasi perkantoran								
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	Jumlah unut pembayaran STNK	52 unit	26 unit	13 unit	13 unit	100	13 unit	13 unit	100

					Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah bangunan yang terpelihara	12 unit	6 unit	2 unit	2 unit	100	2 unit	2 unit	100
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang terpelihara	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100	0 unit	0 unit	0
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase fasilitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik								
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase fasilitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik								
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan di tingkat	4 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	1 dokumen	100

						kecamatan									
7	01	02	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase fasilitasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan public yang dilaksanakan oleh kecamatan									
	01	02	2.01	01	Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan	Jumlah jenis pelayanan	18 dokumen	0 bulan	0 bulan	0 bulan	0%	9 Dokumen	9 Dokumen	100	
7	01	02	2.01	03	Peningkatan Efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di	Jumlah penyusunan data pelayanan	4 laporan	2 laporan	1 laporan	1 laporan	100	1 laporan	1 laporan	100	

					wilayah kecamatan										
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase masyarakat desa/kelurahan yang dapat diberdayakan									
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase masyarakat deas/kelurahan yang dapat diberdayakan									
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat	Jumlah dokumen RPTK	3 dokumen desa	2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	-	-	-	
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah sosialisasi pemberdayaan masyarakat	55 desa	33 desa	11 desa	11 desa	100%	11 desa			
7	01	03	2.02		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat	Persentase masyarakat desa/kelurahan yang dapat									

					Kecamatan	diberdayakan								
7	01	03	2.0 2	0 2	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah peserta sosialisasi peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan	1040 orang	522 orang	260 orang	260 orang	100	260 orang	260 orang	100
7	01	03	2.0 5		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan kegiatan Masyarakat (PNPM)									
7	01	03	2.0 5	0 2	Penanganan Covid-19 di tingkat desa dan kelurahan	Jumlah dokumen penanganan covid-19 di tingkat desa dan kelurahan	2 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0	1 dokumen	1 dokumen	100
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penanganan gangguan bencana								

7	01	04	2.0 1		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban										
7	01	04	2.0 1	0 1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Pelaksanaan koordinasi dalam rangka sinergitas dengan TNI/Polri	4 laporan	2 laporan	1 laporan	1 laporan	100	1 laporan	1 laporan	100		
7	01	04	2.0 1	0 2	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Pelaksanaan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	1 laproan	0 laporan	0 laporan	0 laporan	100	1 kegiatan	1 laporan	100		
7	0 1	0 5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelengaraan urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan kepada camat										
7	0 1	0 5	2.0 1		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase penyelengaraan urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan kepada camat										

7	01	05	2.0 1	0 1	Pembinaan Wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka menetapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945, pelestarian bhineka tunggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan republik indonesia	Jumlahn orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka menetapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945, pelestarian bhineka tunggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan republik indonesia	100 orang								
7	01	05	2.0 1	0 2	Fasilitasi, Koordinasi dan pembinaan (bimtek, SosialisasiKonsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	Jumlah pelaksanaan sosialisasi/bimtek wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	1 kali	0 kali	0 kali	0 kali	0	0 kali			

7	01	05	2.0 1	0 8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah pelaksanaan rapat forum koordinasi pimpinan di kecamatan	4 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	1 dokumen	100
7	0 1	0 6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa berkinerja baik								
7	0 1	0 6	2.0 1		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa berkinerja baik								
7	01	06	2.0 1	0 2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi dalam rangka administrasi tata pemeritahan desa	11 dokumen							
7	01	06	2.0 1	0 3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah monitoring penyusunan APBDes	8 laporan	4 laporan	2 laporan	2 laporan	100	2 laporan	2 laporan	100

7	01	06	2.0 1	0 4	Fasilitasi Penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan	Jumlah pelaksanaan Razia	8 laporan	4 laporan	2 laporan	2 laporan	100	2 laporan	2 laporan	100
7	01	01	2.0 1	0 6	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Fasilitasi pemilihan kepala desa	1 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0 %	1 dokumen	1 dokumen	100
7	01	01	2.0 1	1 3	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan pembangunan partisipatif	Jumlah dokumen RPTK	1 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0%	1 dokumen	1 dokumen	100

Sumber : Renstra Perubahan 2019-2024, 2023

Adapun evaluasi terhadap kinerja keuangan yang dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Kecamatan Cibatu Tahun 2023 menunjukkan dari total anggaran Tahun 2023 sebesar Rp.2.456.862.229,- sampai dengan triwulan II Tahun 2023 dapat direalisasi sebesar Rp 1.280.242.286,- atau mencapai 52,11%. Rincian dari pagu beserta realisasi Anggaran Kecamatan Cibatu Tahun 2023 tersaji pada tabel berikut

Tabel 2. 6
Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Cibatu Tahun 2023 sampai dengan triwulan II

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Tahun 2023 TW II		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	1.879.923.829	1.021.965.965	54,36
7.01.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	39.514.400	17.476.200	44,22
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	36.514.400	17.476.200	47,86
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	500.000	0	0
7.01.01.2.01.03	Koordinasi Penyusunan Perubahan RKA-SKPD	500.000	0	0
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	500.000	0	0
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	500.000	0	0
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	500.000	0	0
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	500.000	0	0
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.535.697.469	842.243.107	54,84
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.531.182.969	842.243.107	55,01
7.01.01.2.02.02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	5.126.000	0	0
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	13.653.500	8.653.500	63,39
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian dinas dan Atribut Kelengkapannya	8.653.500	8.653.500	100
7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegaawai berdasarkan tugas dan fungsi	5.000.000	0	0
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	194.149.900	116.850.413	60,18
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor	11.802.200	2.950.500	25
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	125.041.800	86.741.400	69,37
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.721.200	5.721.200	100
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.634.700	7.249.363	57,38
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan	7.455.000	3.647.950	48,93

	Peraturan Perundang-undangan			
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	16.840.000	6.200.000	36,82
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10.640.000	4.340.000	40,79
7.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4.015.000	0	0
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	54.896.460	17.051.045	31,06
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	21.058.560	6.252.045	29,69
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	6.640.000	3.320.000	50
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	27.197.900	7.479.000	43,17
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	42.012.100	19.691.700	46,87
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	27.512.100	5.191.700	18,87
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	14.500.000	14.500.000	100
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	148.672.000	26.799.000	18,02
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	104.693.000	4.480.000	4,28
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	104.693.000	4.480.000	4,28
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada dikecamatan	43.979.000	22.319.000	40,75
7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	43.979.000	22.319.000	40,75
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	32.330.000	7.255.900	22,44
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	8.106.000	2.262.500	53,77
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8.106.000	2.262.500	27,91
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	10.000.000	4.993.400	49,93
7.01.03.2.01.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000	4.993.400	49,93
7.01.03.2.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	14.224.000	0	0
7.01.03.2.01.02	Penanganan Covid-19 di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	14.224.000	0	0

7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	160.160.000	101.640.000	63,46
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	160.160.000	101.640.000	63,46
7.01.04.2.01.01	Sinergita dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	113.020.000	57.360.000	50,75
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	47.140.000	44.280.000	93,93
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	200.000.000	99.150.000	49,58
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan kepala daerah	200.000.000	99.150.000	49,58
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	200.000.000	99.150.000	49,58
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	35.776.400	23.431.421	65,49
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	35.776.400	23.431.421	65,49
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	3.768.200	3.768.200	100
7.01.06.2.01.04	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-undangan	16.400.000	6.400.000	39,02
7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa	7.780.000	5.435.021	69,86
7.01.06.2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	7.828.200	7.828.200	100

Sumber : Realisasi Anggaran sampai dengan triwulan II , 2023

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa terdapat 31 subkegiatan yang tidak mencapai target, hal ini dikarenakan kondisi tahun anggaran baru sampai triwulan II Selain itu, terdapat 5 subkegiatan yang sudah mencapai target yang disebabkan karena sub kegiatan dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan.

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah. Implikasi merupakan actor atau suatu kesimpulan dari target. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Cibatu adalah sebagai berikut :

- a. Terhadap program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Cibatu Pada **Tahun 2023 (TW II)** berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran pada khususnya dan

kepada masyarakat Kecamatan Cibatu Pada umumnya.

- b. Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Cibatu Berdampak pada laporan kinerja realisasi keuangan Kecamatan Cibatu.

Selain itu, terkait perlu adanya kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan. Adapun factor perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut diatas antara lain dengan mengusulkan kekurangan anggaran pada tahun berikutnya.

Selanjutnya Capaian Renstra merupakan hasil pelaksanaan Renja setiap tahun. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemantauan dan supervisi untuk memastikan rencana program Renstra dapat diwujudkan. Evaluasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Rencana Kerja Kecamatan Cibatu selama kurun waktu 1 (satu) tahun dan perbandingan realisasi Renja SKPD tahun sebelumnya serta target kinerja kegiatan Renja tahun berjalan dapat dilihat pada table 2.7 berikut ini :

Tabel 2. 7

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Kecamatan Cibatu Kabupaten Garut Tahun 2023 TW II

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Su bkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (Tahun 2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (tahun 2023)		Realisasi Kinerja Triwulanan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perang kat Daerah Penang gung Jawab (Bidang /Kasi)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I	II	III	IV	12		13= 6+12		14=13/5 x 100%		
														K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8	9	10	11	12		13= 6+12		14=13/5 x 100%		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	Rp	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatn ya Akuntabilit as Kinerja Kecamatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang- undangan di badan kesatuan bangsa dan politik	100 %	9.804.225.245	100%	1.998.041.456	100%	2.456.862.229	359.181.384	662.784.581				1.021.965.965		3.020.007.421		3.020.007.421	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	19.902.160	100%		100%												
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	0	0	100%	3.081.600	100%	36.514.400	8.738.100	8.738.100			54,36	17.476.200		20.556.800		20.556.800	Subbag umum
		Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA- SKPD	0	0	0	0	100%	500.000	0	0			0	0		0		0	
		Koordinasi dan penyusunan perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD	0	0	0	0	100%	500.000	0	0			0	0		0		0	
		Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA- SKPD	0	0	0	0	100%	500.000	0	0			0	0		0		0	
		Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD	0	0	0	0	100%	500.000	0	0			0	0		0		0	
		Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	Jumlah laporan realisasi kinerja SKPD	0	0	0	0	100%	500.000	0	0			0	0		0		0	

	SKPD																	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Evaluasi kinerja perangkat daerah	10 laporan		-	3.850.000	100%	500.000	0	0		0	0	0		0		0
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan akhir tahun	12		100%	-	100%			0								
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN	12 bulan		100%	1.547.080.588	100%	1.531.182.969	302.135.805	540.107.302		55,01	842.243.107	2.389.323.695		2.389.323.695		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen keuangan	1 dokumen		100%	5.126.000	100%	4.514.500	0	0		0	0	5.126.000		5.126.000		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kepegawaian Perangkat Daerah	60		100%		100%											
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah stel pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	85 stel		100%	9.427.900	100%	8.653.500	8.653.500	0		100	8.653.500	18.081.400		18.081.400		
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan	1 orang		100%	0		5.000.000	0	0		0	0	0		0		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai	60		100%		100%											
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah item penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor	50 jenis		100%	6.543.000	100%	11.802.200	2.950.500	0		25	2.950.500	9.493.500		9.493.500		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	205 jenis		100%	64.358.670	100%	125.041.800	13.686.100	73.055.300		69,37	86.741.400	151.100.000		151.100.000		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket penyediaan peralatan rumah tangga yang disediakan	80 jenis		100%	2.470.086	100%	5.721.200	5.721.200	0		100	5.721.200	8.191.286		8.191.286		
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	360 Exemplar		100%	0	100%	7.455.000	1.784.700	1.863.250		48,93	3.647.950	3.647.950		3.647.950		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis penyediaan barang cetak dan penggandaan	60 jenis		100%	25.267.400	100%	12.632.700	3.758.600	3.490.763		57,38	7.249.363	25.516.763		25.516.763		
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah pelaksanaan fasilitasi kunjungan tamu	6820 kali		100%	37.376.500	100%	16.840.000	3.540.000	2.660.000		36,82	6.200.000	43.960.000		43.960.000		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	3000 keg		100%	38.760.000	100%	10.640.000	2.520.000	1.820.000		40,79	4.340.000	43.100.000		43.100.000		
	Penatausahaan Arsip Dinamis		1 laporan	0	0	0	100%	4.015.000	0	0		0	0	0		0		

	Pengadaan Brang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah penyediaan mebel sesuai kebutuhan	60		100%	0	100%	0									
	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	1 paket		100%	71.488.138	100%	0	0	0		0	0	71.488.138		71.488.138	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60 bln		100%		100%										
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	60 bulan		100%	11.602.024	100%	21.058.560	3.072.979	3.179.066		29,69	6.252.045	17.854.169		17.854.169	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa peralatan kantor dan perlengkapan	15 item		100%	10.040.000	100%	6.640.000	1.660.000	1.660.000		50	3.320.000	13.360.000		13.360.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jenis pelayanan umum kantor	53 item		100%	16.458.500	100%	27.197.900	4.264.000	3.215.000		27,50	7.479.000	23.937.500		23.937.500	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	60 bln		100%		100%							0		0	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit pembayaran STNK	40 unit		100%	8.990.350	100%	27.512.100	2.417.100	2.774.600		18,87	5.191.700	14.182.050		14.182.050	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah bangunan yang terpelihara	2 gedung		100%	110.389.000	100%	14.500.000	14.500.000	0		100	14.500.000	124.889.000		124.889.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang terpelihara	1 unit		100%	25.309.000	0	0	0	0		0	0	25.309.000		25.309.000	
Meningkatnya kualitas pelayanan di tingkat Kecamatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase fasilitasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik	100 %		100%		100%	148.672.00	12.919.000	13.880.000		18,03	26.799.000				
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase fasilitasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan public	60		100%		100%										
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	40 laporan		100%	72.718.600	100%	104.693.000	1.080.000	0		4,28	4.480.000	77.198.600		77.198.600	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase fasilitasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan public yang dilaksanakan oleh kecamatan	60 bln		100%		100%										

	Peningkatan Efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan		12 bulan			47.600.000	0	0	0	0		0	0	47.600.000	47.600.000
	Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan	Jumlah jenis pelayanan	20 Orang		100%	0	100%	43.979.000	11.839.000	10.480.000		50,75	22.319.000	22.319.000	22.319.000
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase masyarakat desa/kelurahan yang dapat diberdayakan	100%		100%	15.810.000	100%	32.330.000	2.150.100	5.105.800		22,44	7.255.900	23.065.900	23.065.900
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase masyarakat deas/kelurahan yang dapat diberdayakan	100%		100%	15.810.000	100%								
	Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat	Jumlah dokumen RPTK	1 dokumen		100%	7.086.000	100%	0	0	0		0	0	7.086.000	7.086.000
	Peningkatan Efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah sosialisasipemberdayaan masyarakat	11 desa		100%	8.724.000	100%	8.106.000	342.000	1.920.500		27,91	2.262.500	10.986.500	10.986.500
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase masyarakat desa/kelurahan yang dapat diberdayakan	100%		100%		100%								
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah peserta sosialisasi peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan	100%		100%	27.385.000	100%	10.000.000	1.808.100	3.185.300		49,93	4.993.400	32.378.400	32.378.400
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembrlakuan Pembatasan kegiatan Masyarakat (PNPM)														
	Penanganan Covid-19 di tingkat desa dan kelurahan		0	0	0	0	100%	14.224.000	0	0		0	0	0	0
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penanganan gangguan bencana	100%		100%	123.118.000	100%	123.118.000	29.060.000	72.580.000		63,46	101.640.000	224.758.000	224.758.000
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban	100%		100%	123.118.000	100%								
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional	Pelaksanaan koordinasi dalam rangka sinergitas dengan TNI/Polri	170 Laporan		100%	114.000.000	100%	113.020.000	29.060.000	28.300.000		50,75	57.360.000	171.360.000	171.360.000

	Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																	
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Pelaksanaan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	60 Dus		100%	9.118.000	100%	47.140.000	0	44.280.000		93,93	44.280.000		53.398.000		53.398.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan kepada camat	100 %		100%	200.000.000	100%	200.000.000	33.496.300	65.653.700		49,58	99.150.000		299.150.000		299.150.000	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan kepada camat	60 Laporan		100%	200.000.000	100%								299.150.000		299.150.000	
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah pelaksanaan rapat forum koordinasi pimpinan di kecamatan	60 Laporan		100%	200.000.000	100%	200.000.000	33.496.300	65.653.700		49,58	99.150.000		299.150.000		299.150.000	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa berkinerja baik	100 %		100%	17.643.000	100%	35.776.400	11.328.200	12.103.221		65,49	23.431.421		41.074.421		41.074.421	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa berkinerja baik	100 %		100%	17.643.000	100%						23.431.421		41.074.421		41.074.421	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah monitoring penyusunan APBDes	12 kali		100%	6.476.000	100%	3.768.200	0	3.768.200		100	3.768.200		10.244.200		10.244.200	
	Fasilitasi Penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan	Jumlah pelaksanaan Razia	3 Kegiatan		100%	11.167.000	100%	16.400.000	0	6.400.000		39,02	6.400.000		17.567.000		17.567.000	
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Fasilitasi pemilihan kepala desa	1 kegiatan	0	100%	0	100%	0	3.500.000	1.935.021		69,86	5.435.021		5.435.021		5.435.021	
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan pembangunan partisipatif	Jumlah dokumen RPTK	1 dokumen			0	100%	7.828.000	7.828.200	0		100	7.828.200		7.828.200		7.828.200	
Rata-rata capaian kinerja (%)																		
Predikat Kinerja																		

Faktor pendorong pencapaian kinerja :

Faktor penghambat

Usulan tindak lanjut pada Renja Perangkat Daerah kabupaten Garut berikutnya

Usulan tindak lanjut pada Renstra Perangkat Daerah kabupaten Garut berikutnya

Sumber : Lap. Evaluasi renja, 2022

2.2.3. Dukungan Pemerintah Daerah dalam Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) & Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) serta Proyek Strategis Nasional (*Stunting*)

Adapun dukungan pemerintah daerah dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Tahun 2023. Untuk tujuan dan target SDGs yang tidak terkait dengan area SPM tidak diuraikan lebih lanjut dalam dokumen ini, karena tidak ada perubahan target. *Stunting* menjadi salah satu proyek strategis nasional, seiring dengan hal tersebut upaya Kabupaten Garut dalam menurunkan angka prevalensi *stunting* adalah dengan dibentuknya Tim Percepatan Penurunan *Stunting* melalui penerbitan Keputusan Bupati Garut Nomor 440/KEP.189-Kecamatan Cibatu/2022, serta diterbitkannya Program TOSS (Temukan, Obati, Sayangi balita *Stunting*) guna mengatasi *stunting* di Kabupaten Garut. Program TOSS ini merupakan program lanjutan setelah BPS (Bulan Penimbangan *Stunting*) yang telah berjalan selama bulan juni tahun 2022 dalam rangka mengobati balita *stunting* serta mencegah timbulnya kasus *stunting* baru di Kabupaten Garut.

2.3. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

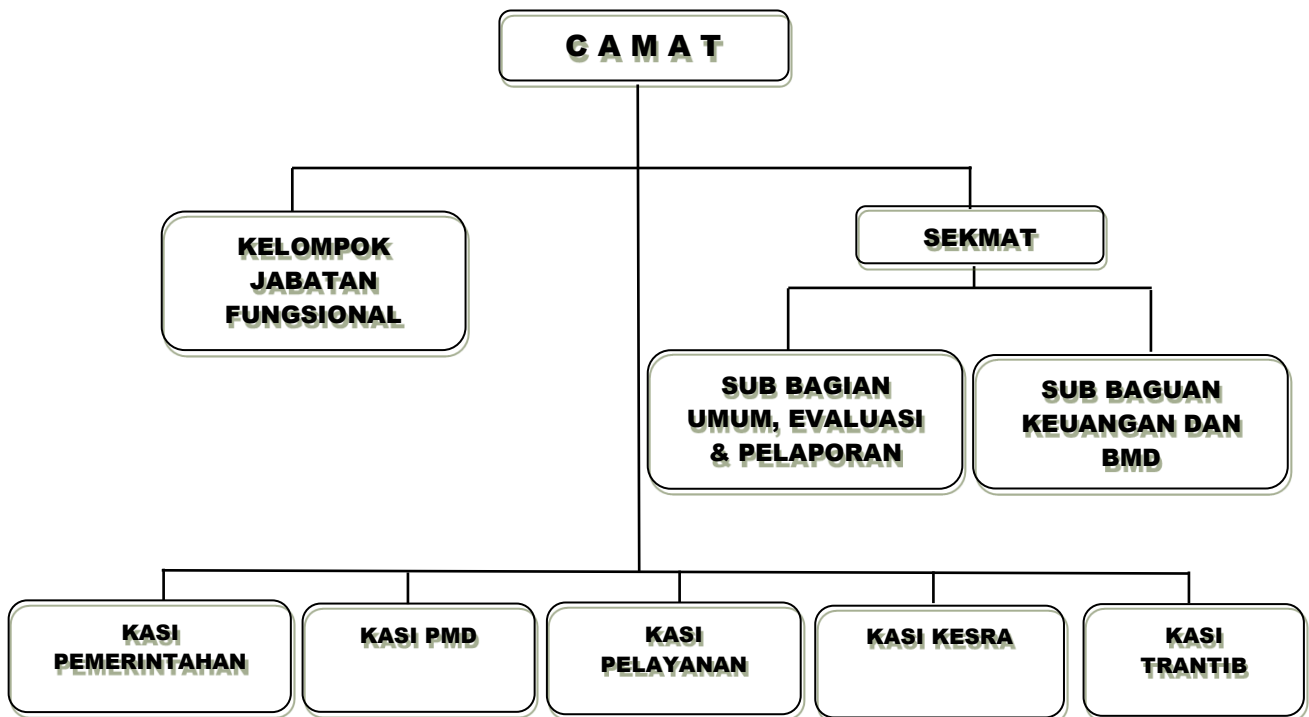
Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dilakukan melalui Penetapan Indikator Kinerja yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator – indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing – masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

Kecamatan Cibatu sebagai salah satu Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak saja berurusan dengan aspek pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, melainkan juga merupakan ujung tombak pelayanan kepada masyarakat. Oleh karenanya capaian kinerja pelayanannya lebih banyak dianalisis dari sudut pandang tugas pokok dan fungsi Kecamatan Cibatu Adapun tugas pokok dan fungsi Kecamatan Cibatu berdasarkan Peraturan Bupati Garut Nomor 235 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 235) maka perangkat daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan

bagaimana cara menentukan tolak ukur kinerja dan indikator pelayanan masing masing sesuai tupoksi serta norma dan standar pelayanan perangkat daerah yang bersangkutan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan berikut:

Bagan 2. 1 Struktur organisasi Kecamatan Cibatu

Bagan Struktur organisasi Kecamatan Cibatu



Sumber: Peraturan Daerah No. 27 Tahun 2016

CAMAT

1. Camat mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik serta pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan meliputi pemerintahan, kesejahteraan masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan desa, ketenteraman dan ketertiban umum serta pelayanan.
2. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat mempunyai fungsi:
 - a. perumusan, pengaturan, pengkoordinasian, pembinaan dan pelaksanaan kebijakan umum dan teknis operasional bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Masyarakat, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, ketenteraman dan ketertiban umum serta pelayanan;
 - b. penyelenggaraan pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan tugas bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Masyarakat, Pemberdayaan Masyarakat dan

- Desa, ketenteraman dan ketertiban umum serta pelayanan;
- c. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - d. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Kecamatan.

Sekretaris

1. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, mempunyai tugas merumuskan rencana kerja kesekretariatan yang meliputi pelayanan umum, kepegawaian, keuangan serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
2. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja kesekretariatan;
 - b. pengumpulan, pengolahan usulan program dan kegiatan;
 - c. penyelenggaraan tugas-tugas kesekretariatan;
 - d. penyelenggaraan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan meliputi pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, humas, protokol, perlengkapan, rumah tangga dinas dan administrasi kepegawaian, melaksanakan penatausahaan keuangan, barang milik daerah serta urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 - e. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - f. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja sekretariat.

Kasubbag Umum, Evaluasi dan Pelaporan

1. Subbagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris, mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, kehumasan dan keprotokolan, penyiapan kebutuhan pegawai, pembinaan dan pengembangan pegawai serta administrasi kepegawaian lainnya serta menyusun dan melaksanakan koordinasi dalam pengumpulan dan pengolahan data perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan bahan pelayanan umum dan kepegawaian, kelembagaan dan ketatalaksanaan serta bahan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 - b. pelaksanaan pelayanan administrasi urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, kehumasan, keprotokolan, rumah tangga kedinasan dan administrasi kepegawaian serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 - c. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja subbagian umum, perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

Kasubag Keuangan

1. Subbagian Keuangan dan Barang milik daerah dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris, mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian Keuangan dan Barang milik daerah mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan bahan rencana anggaran Dinas;
 - b. pelaksanaan teknis administrasi pengelolaan keuangan dan barang milik daerah Dinas;
 - c. pelaksanaan penyusunan laporan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah Dinas;
 - d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Subbagian Keuangan.

Seksi Pemerintahan

1. Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja seksi pemerintahan.

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional seksi pemerintahan;
 - b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja seksi pemerintahan;
 - c. pengumpulan dan pengolahan data seksi pemerintahan;
 - d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja seksi pemerintahan.

Seksi Kesejahteraan Masyarakat

1. Seksi Kesejahteraan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Kesejahteraan Masyarakat.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional seksi kesejahteraan masyarakat;
 - b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja seksi kesejahteraan masyarakat;
 - c. pengumpulan dan pengolahan data seksi kesejahteraan masyarakat;
 - d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja seksi kesejahteraan masyarakat.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala seksi pemberdayaan masyarakat dan desa mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional seksi pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja seksi pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - c. pengumpulan dan pengolahan data seksi pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja seksi pemberdayaan masyarakat dan desa.

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

1. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab secara administratif kepada Camat dan secara teknis operasional bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja melalui Camat, mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja seksi ketenteraman dan ketertiban umum.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala seksi ketenteraman dan ketertiban umum mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional seksi ketenteraman dan ketertiban umum;
 - b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja seksi ketenteraman dan ketertiban umum;
 - c. pengumpulan dan pengolahan data seksi ketenteraman dan ketertiban umum;
 - d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugasnya;
 - e. pelaksanaan tugas tambahan ex-officio Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada Kecamatan sebagai Kepala Satuan Unit Pelaksana Polisi Pamong Praja; dan
 - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja seksi ketenteraman dan ketertiban umum.

Seksi Pelayanan

1. Seksi Pelayanan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja seksi pelayanan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala seksi pelayanan mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Pelayanan;
 - b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pelayanan;
 - c. pengumpulan dan pengolahan data Seksi Pelayanan;
 - d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Pelayanan.

Selanjutnya dilakukan analisis capaian kinerja atas sasaran yang didasarkan atas hasil pengukuran kinerja Program dan kegiatan dalam suatu sasaran dilakukan analisis pencapaian kinerja atas sasaran tersebut. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Untuk lebih jelasnya dapat disajikan tabel 2.9 sebagai berikut :

Tabel 2. 9**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Cibatu Kabupaten Garut**

NO	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Nilai SKM			79	79,50	80	80,50	80	80,10	87	87,5	
2	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan			80	80,05	81	81,50	82	83	85	86	
3	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan			82%	85%	88%	100%	82	83	88	88	
4	Nilai SAKIP Kecamatan			C	CC	B	B	C	CC	B	B	
<i>Sumber : Pengolahan Data Kecamatan Cibatu, 2023</i>												

2.4. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan evaluasi terhadap capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Cibatu Kabupaten Garut pada tahun 2023, dapat diidentifikasi beberapa isu strategis sebagai berikut.

1. Penanganan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja, penanganan stunting, penurunan Angka Kematian Ibu, penanganan Bencana Alam dan Non Alam;
2. Peningkatan Pelayanan Publik dan penguatan demokrasi, moral, etika, tanggung jawab sosial, serta kesetaraan gender, kekerasan pada perempuan dan pemenuhan hak anak;
3. Peningkatan Kapasitas SDM
4. Pemenuhan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta sosial;
5. Penanganan kebencanaan baik alam maupun non alam
6. Peningkatan nilai tambah ekonomi dari pemanfaatan hasil pertanian, industri dan perdagangan, serta pariwisata dan jasa produktif lainnya;

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Cibatu bahwa ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

1. Belum Optimalnya penataan ketatalaksanaan pelayanan publik
2. Belum Optimalnya penataan kelembagaan dan perangkat desa
3. Belum optimalnya penanganan permasalahan perekonomian dan kesejahteraan sosial masyarakat.
4. Belum optimalnya penanggulangan pandemi COVID-19.
5. Belum optimalnya penanggulangan Stunting.
6. Belum optimalnya penguatan demokrasi.

Adapun hambatan dalam menanggulangi isu-isu strategis yang berkembang selama ini diantaranya :

1. Belum meratanya kemampuan SDM dan Sarana Prasarana Pelayanan di tiap desa.

2. Pemahaman masyarakat terhadap peraturan yang ada kurang update
3. Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang pelayanan publik.
4. Keterbatasan lapangan pekerjaan.
5. Keterbatasan masyarakat dalam penerimaan informasi tentang Stunting.
6. Keterbatasan masyarakat dalam penerimaan informasi tentang demokrasi.

2.5. Review terhadap Rancangan Perubahan Renja

Review adalah aktivitas untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Renja Kecamatan Cibatu disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Cibatu serta mengacu kepada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Garut sebagai dokumen perencanaan pembangunan dan sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Cibatu Tahun 2023 dilakukan dengan mengacu pada Perubahan RKPD Kabupaten Garut Tahun 2023 yang merupakan penjabaran tahun keempat pelaksanaan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024.

Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023 merupakan acuan bagi penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023. Dalam rangka *review* terhadap Rancangan Perubahan RKPD maka dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Perubahan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan pada Perubahan Renja.

Proses review terhadap Rancangan Perubahan RKPD dilakukan untuk mengidentifikasi kesesuaian program, kegiatan, dan sub kegiatan yang direncanakan pada perubahan Renja dengan arahan Rancangan Perubahan RKPD. Proses perbandingan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan pada Perubahan Renja Kecamatan Cibatu Tahun 2023 menghasilkan temuan-temuan sebagai berikut:

1. Jumlah program antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan pada Perubahan Renja Kecamatan Cibatu Tahun 2023 telah sesuai yaitu sebanyak 6 program, yaitu :
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

- b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
 - c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
 - d. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - e. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
 - f. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.
2. Jumlah kegiatan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan pada Perubahan Renja Kecamatan Cibatu Tahun 2023 telah sesuai yaitu sebanyak 14 kegiatan, yang terdiri dari 36 sub kegiatan;
 3. Kebutuhan dana/pagu Indikatif yang tercantum pada Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 2.881.186.828,- telah sesuai dengan kebutuhan dana/pagu indikatif hasil analisis kebutuhan pada Perubahan Renja Kecamatan Cibatu Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 2.456.862.229,-. Secara kronologis, pagu indikatif Renja Kecamatan Cibatu Tahun 2023 sebelum perubahan mencapai sebesar Rp. 2.628.540.857,00 dan mengalami penyesuaian sebesar Rp. 171.658.621,00 pada APBD Tahun 2023 menjadi Rp. 2.456.882.229,00, dan hasil analisis kebutuhan pagu indikatif pada Perubahan Renja Kecamatan Cibatu Tahun 2023 mencapai sebesar Rp.2.456.882.229,00 atau berkurang Rp.171.658.229,00 dari anggaran pada APBD Tahun 2023.
 4. Sesuai Hasil Analisis Kebutuhan, indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Kecamatan Cibatu Tahun 2023 telah disusun sesuai dengan indikator kinerja sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Tabel 2.
Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD tahun 2023

Kabupaten: Garut
Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Cibatu

NO					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting		
					Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)			
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)		
7					UNSUR KEWILAYAHAN					UNSUR KEWILAYAHAN							
7	01				KECAMATAN					2.456.882.229	KECAMATAN					2.456.882.229	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	1.879.923.829	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	1.879.923.829			
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	39.514.400	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	39.514.400			
7	01	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen	Kec. Cibatu	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	36.514.400	Penyusunan Dokumen	Kec. Cibatu	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	36.514.400			

					Perencanaan Perangkat Daerah		Perencanaan perangkat daerah			Perencanaan Perangkat Daerah		Perencanaan perangkat daerah	n		
7	01	01	2,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec. Cibatu	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	500.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec. Cibatu	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	500.000	
7	01	01	2,01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kec. Cibatu	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	500.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kec. Cibatu	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	500.000	
7	01	01	2,01	04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kec. Cibatu	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	500.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kec. Cibatu	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	500.000	
7	01	01	2,01	05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DKA-SKPD	Kec. Cibatu	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan	1 dokumen	500.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DKA-SKPD	Kec. Cibatu	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi	1 dokumen	500.000	

							dokumen Perubahan DKA-SKPD					penyusunan dokumen Perubahan DKA-SKPD				
7	01	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Cibatu	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja	1 laporan	500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Cibatu	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja	1 laporan	500.000		
7	01	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Cibatu	Jumlah laporan Evaluasi kinerja perangkat daerah	1 laporann	500.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Cibatu	Jumlah laporan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap kecamatan	2 Dokumen	500.000		
7	01	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Laporan	1.535.697.469	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Laporan	1.535.697.469		
7	01	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Cibatu	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	14 orangn/bulan	41.531.182.969	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Cibatu	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan	14 orangn/bulan	41.531.182.969		

												ASN				
7	01	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Cibatu	Jumlah laporan keuangan akhir tahun dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun	1 laporan	4.514.500	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Cibatu	Jumlah laporan keuangan akhir tahun dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun	1 laporan	4.514.500		
7	01	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Laporan	13.653.500	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Laporan	13.653.500		
7	01	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kec. Cibatu	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	29 paket	8.653.500	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kec. Cibatu	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	29 paket	8.653.500		
7	01	01	2,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kec. Cibatu	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	3 orang	5.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kec. Cibatu	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	3 orang	5.000.000		

7	01	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan	194.149.900	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan	194.149.900	
7	01	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Cibatu	Jumlah paket penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor	1 paket	11.802.200	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Cibatu	Jumlah paket penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	1 paket	11.802.200	
7	01	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Cibatu	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 paket	125.041.800	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Cibatu	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 pakets	125.041.800	
7	01	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec. Cibatu	Jumlah paket penyediaan peralatan rumah tangga yang disediakan	1 paket	5.721.200	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec. Cibatu	Jumlah paket penyediaan peralatan rumah tangga yang disediakan	1 paket	5.721.200	
7	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Cibatu	Jumlah paket barang cetak dan pengadaan yang disediakan	1 paket	12.634.700	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Cibatu	Jumlah paket barang cetak dan pengadaan yang disediakan	1 paket	12.634.700	

7	01	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kec. Cibatu	Jumlah dokumen penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 dokumen	7.455.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kec. Cibatu	Jumlah dokumen penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 dokumen	7.455.000
7	01	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Cibatu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	1 laporan	16.840.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Cibatu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	1 laporan	16.840.000
7	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Cibatu	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 laporan	10.640.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Cibatu	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 laporan	10.640.000
7	01	01	2,06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kec. Cibatu	Jumlah dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	4.015.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kec. Cibatu	Jumlah dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	4.015.000
7	01	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	54.896.460	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	54.896.460

7	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Cibatu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	1 laporan	21.058.560	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Cibatu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	1 laporan	21.058.560
7	01	01	2,08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Cibatu	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 laporan	6.640.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Cibatu	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 laporan	6.640.000
7	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Cibatu	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1 laporan	27.197.900	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Cibatu	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1 laporan	27.197.900
7	01	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	42.012.100	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	42.012.100

7	01	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Cibatu	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	13 unit	27.512.100	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Cibatu	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	13 unit	27.512.100	
7	01	01	2,09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Cibatu	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3 unit	14.500.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Cibatu	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3 unit	14.500.000	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	148.672.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	148.672.000	
7	01	02	2,01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan		Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan	1 Laporan	104.693.000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan		Jumlah Laporan Pelaksanaan	1 Laporan	104.693.000	

					di Tingkat Kecamatan		n Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			di Tingkat Kecamatan		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
7	01	02	2,01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Cibatu	Jumlah Pelaksanaan Monitoring Program Bansos, Fasilitasi Kegiatan Keagamaan, Fasilitasi Kegiatan olahraga, pembinaan PBB, Penanggulangan COVID-19 danPerkembangan Kesejahteraan Masyarakat	8 Kegiatan	104.693.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Cibatu	Jumlah Pelaksanaan Monitoring Program Bansos, Fasilitasi Kegiatan Keagamaan, Fasilitasi Kegiatan olahraga, pembinaan PBB, Penanggulangan COVID-19 danPerkembangan Kesejahteraan Masyarakat	8 Kegiatan	104.693.000	
7	01	02	2,02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja	1 Laporan	43.979.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang	1 Laporan	43.979.000	

					Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan			Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan			
7	01	02	2,02	01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Ke. Cibatu	Jumlah perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat	9 dokumen	43.979.000	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Ke. Cibatu	Jumlah perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat	9 dokumen	43.979.000	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	32.330.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	32.330.000	
7	01	03	2,01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1 Laporan	8.106.000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1 Laporan	8.106.000	
7	01	03	2,01	03	Peningkatan Efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Kec. Cibatu	Junlah Laporan Peningkatan Efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah	1 laporan	8.106.000	Peningkatan Efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Kec. Cibatu	Junlah Laporan Peningkatan Efektifitas kegiatan pemberdayaan	1 laporan	8.106.000	

						kecamatan					masyarakat di wilayah kecamatan				
7	01	03	2,03		Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Tingkat Kecamatan			1 laporan	10.000.000	Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Tingkat Kecamatan		1 laporan	10.000.000		
7	01	03	2,03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat	Kec. Cibatu	Jumlah Peserta Sosialisasi Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan	260 orang	10.000.000	Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat	Kec. Cibatu	Jumlah Peserta Sosialisasi Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan	260 orang	10.000.000	
7	01	03	2,05		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat	Kec. Cibatu			14.224.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat	Kec. Cibatu			14.224.000	
7	01	03	2,05	02	Penanganan Covid-19 di tingkat Desa dan Kelurahan	Kec. Cibatu	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	1 Dokumen	14.224.000	Penanganan Covid-19 di tingkat Desa dan Kelurahan	Kec. Cibatu	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	1 Dokumen	14.224.000	
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	160.160.000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	160.160.000	

7	01	04	2,01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Laporan	160.160.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Laporan	160.160.000	
7	01	04	2,01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Cibatu	Jumlah Laporan hasil sinergitas dengan kepolisian Negara republic Indonesia, tentara nasional Indonesia dan instansi vertical di wilayah kecamatan	1 laporan	113.020.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Cibatu	Jumlah Laporan hasil sinergitas dengan kepolisian Negara republic Indonesia, tentara nasional Indonesia dan instansi vertical di wilayah kecamatan	1 laporan	113.020.000	
7	01	04	2,01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec. Cibatu	Jumlah laporan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh masyarakat	1 Kegiatan	47.140.000	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec. Cibatu	Jumlah laporan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh	1 Kegiatan	47.140.000	

											masyarakat			
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100 %	200.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100 %	200.000.000
7	01	05	2,01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	1 Laporan	200.000.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	1 Laporan	200.000.000
7	01	05	2,01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec. Cibatu	Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi Forkopimcam Terkait Covid-19	1 Dokumen	200.000.000	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec. Cibatu	Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi Forkopimcam Terkait Covid-19	1 Dokumen	200.000.000
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN		Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	35.776.400	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN		Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	35.776.400

					DESA					DESA				
7	01	06	2,01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Junlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1 Laporan	35.776.400	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Junlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1 Laporan	35.776.400
7	01	06	2,01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Cibatu	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	1 dokumen	3.768.200	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Cibatu	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	1 dokumen	3.768.200
7	01	06	2,01	04	Fasilitasi Penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan	Kec. Cibatu	Jumlah laporan fasilitasi dalam rangka penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan	2 laporan	16.400.000	Fasilitasi Penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan	Kec. Cibatu	Jumlah laporan fasilitasi dalam rangka penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan	2 laporan	16.400.000

7	01	06	2,01	06	Fasilitasi Pelaksanaan	Kec. Cibatu	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka pemilihan kepala desa	1 dokumen	7.780.000	Fasilitasi Pelaksanaan	Kec. Cibatu	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka pemilihan kepala desa	1 dokumen	7.780.000		
7	01	06	7.828.200	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kec. Cibatu	Jumlah dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	1 Dokumen	7.828.200	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kec. Cibatu	Jumlah dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	1 Dokumen	7.828.200		
TOTAL									2.456.862.229						2.456.862.229	

Tabel 2. 10
Rancangan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Cibatu Kabupaten Garut Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif					
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah				
7						UNSUR KEWILAYAHAN																
7	01								2.881.186.828	2.628.540.857	2.456.862.219				2.645.342.500							
7	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang tepat waktu	%	%	100 %	100 %	2.306.865.328	1.998.916.757	1.879.923.829			100 %	2.067.615.200				
7	01	01	2,01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	46.351.220	39.514.400	39.514.400			1 Dokumen	43.165.800			
7	01	01	2,01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	43.351.220	36.514.400	36.514.400	Kab. Garut, Cibatu, Cibatu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kantor Kecamatan	1 Dokumen	40.165.800	Kecamatan Cibatu
7	01	01	2,01	02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	500.000	500.000	500.000	Kab. Garut, Cibatu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kantor Kecamatan	1 Dokumen	500.000	Kecamatan Cibatu
7	01	01	2,01	03		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	500.000	500.000	500.000	Kab. Garut, Cibatu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kantor Kecamatan	1 Dokumen	500.000	Kecamatan Cibatu

7	01	01	2,01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	500.000	500.000	500.000	Kab. Garut, Cibatu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kantor Kecamatan	1 Dokumen	500.000	Kecamatan Cibatu
7	01	01	2,01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	500.000	500.000	500.000	Kab. Garut, Cibatu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kantor Kecamatan	1 Dokumen	500.000	Kecamatan Cibatu
7	01	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	500.000	500.000	500.000	Kab. Garut, Cibatu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kantor Kecamatan	1 Laporan	500.000	Kecamatan Cibatu
7	01	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	500.000	500.000	500.000	Kab. Garut, Cibatu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kantor Kecamatan	1 Laporan	500.000	Kecamatan Cibatu
7	01	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Akhrit Tahun	laporan		laporan	1 laporan	1 laporan	1.817.899.277	1.636.510.397	1.535.697.469						1 laporan	1.689.267.100	
7	01	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bu	11a4n Orang/bulan	1.812.684.777	1.631.295.897	1.531.182.969	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kantor Kecamatan	14 Orang/bulan	1.684.301.200	Kecamatan Cibatu

7	01	01	2,0 2	0 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 laporan	1 laporan	00	5.214.5	5.214.500	4.514.500	Kab. Garut, Cibatu, Cibatu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kantor Kecamatan	1 laporan	4.965.900	Kecamatan Cibatu
7	01	01	2,0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	bulan	bulan	12 bulan	12 bulan			18.653.500	13.653.500	13.653.500						12 bulan	15.018.800	
7	01	01	2,0 5	0 2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				29 Paket	29 Paket	00	8.653.5	8.653.500	8.653.500	Kab. Garut, Cibatu, Cibatu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kantor Kecamatan	29 Paket	9.518.800	Kecamatan Cibatu
7	01	01	2,0 5	0 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				3 orang	3 orang	000	10.000.	5.000.000	5.000.000	Kab. Garut, Cibatu, Cibatu	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kantor Kecamatan	3 orang	5.500.000	Kecamatan Cibatu
7	01	01	2,0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Peralatan dan Perlengkapann kantor yang memadai Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	item %	item %	7 item 100 %	7 item 100 %			276.443.421	212.329.900	194.149.900						7 item 100 %	213.564.200	
7	01	01	2,0 6	0 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	200	11.802.	11.802.200	11.802.200	Kab. Garut, Cibatu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kantor Kecamatan	1 Paket	12.984.704	Kecamatan Cibatu
7	01	01	2,0 6	0 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	21	156.527.3	125.041.800	125.041.800	Kab. Garut, Cibatu, Semua	Dana Transfer Umum-Dana		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kantor Kecamatan	1 Paket	137.545.900	Kecamatan Cibatu

7	01	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6.841.600	5.721.200	5.721.200	Kab. Garut, Cibatu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kantor Kecamatan	1 Paket	6.293.300	Kecamatan Cibatu
7	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	27.912.300	12.634.700	12.634.700	Kab. Garut, Cibatu, Cibatu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kantor Kecamatan	1 Paket	13.898.100	Kecamatan Cibatu
7	01	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				1 dokumen	1 dokumen	7.455.000	7.455.000	7.455.000	Kab. Garut, Cibatu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kantor Kecamatan	1 dokumen	8.200.000	Kecamatan Cibatu
7	01	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 laporan	1 laporan	29.470.000	22.630.000	16.840.000	Kab. Garut, Cibatu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kantor Kecamatan	1 laporan	48.524.000	Kecamatan Cibatu
7	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 laporan	1 laporan	27.900.000	21.840.000	10.640.000	Kab. Garut, Cibatu, Cibatu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kantor Kecamatan	1 laporan	11.704.000	Kecamatan Cibatu
7	01	01	2,06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	8.535.000	5.205.000	4.015.000	Kab. Garut, Cibatu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kantor Kecamatan	1 Dokumen	4.416.500	Kecamatan Cibatu
7	01	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	%		100 %	100 %	86.328.210	54.896.460	54.896.460						100 %	60.386.00	
7	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang				1 Laporan	1 Laporan	25.292.400	21.058.560	21.058.560	Kab. Garut, Cibatu, Cibatu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kantor Kecamatan	1 Laporan	23.164.400	Kecamatan Cibatu

7	01	01	2,083	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					1 Laporan	1 Laporan	6.640.000	6.640.000	6.640.000	Kab. Garut, Cibatu, Cibatu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kantor Kecamatan	1 Laporan	7.304.000	Kecamatan Cibatu	
7	01	01	2,084	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					1 Laporan	1 Laporan	54.395.810	27.197.900	27.197.900	Kab. Garut, Cibatu, Cibatu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kantor Kecamatan	1 Laporan	29.917.600	Kecamatan Cibatu	
7	01	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	%			100 %	100 %	61.189.700	42.012.100	42.012.100						100 %	46.213.300		
7	01	01	2,091	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					13 Unit	13 Unit	37.189.700	27.512.100	27.512.100	Kab. Garut, Cibatu, Cibatu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kantor Kecamatan	13 Unit	30.363.300	Kecamatan Cibatu	
7	01	01	2,099	09	Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi					3 Unit	3 Unit	24.000.000	14.500.000	14.500.000	Kab. Garut, Cibatu, Cibatu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kantor Kecamatan	3 Unit	15.950.000	Kecamatan Cibatu	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh kecamatan	%	%			100 %	100 %	163.244.000	160.122.900	148.672.000						100 %	115.162.300		
7	01	02	2,011		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Kegiatan Keagamaan jumlah Laporan Kegiatan Kepemudaan dan Olahraga	laporan laporan laporan laporan laporan laporan laporan				1 laporan	1 laporan	114.365.000	114.743.900	104.693.000							1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan	115.162.300	

		Jumlah laporan lomba desa Jumlah laporan Pembinaan dan Monitoring jumlah laporan Penanggulangan Covid-19 Jumlah laporan pengelolaan PBB Jumlah laporan pengumpulan, pengolahan data di kecamatan Penyelenggaraan Upacara hari besar nasional dan upacara/acara lainnya				1 laporan	1 laporan								1 laporan			
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	114.365.000	114.743.900	104.693.000	Kab. Garut, Cibatu, Cibatu	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kantor Kecamatan	1 Dokumen	115.162.300	Kecamatan Cibatu
7 01 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan di Kecamatan	laporan		laporan	7 laporan	7 laporan	48.879.000	45.379.000	43.979.000						7 laporan	48.376.900	
7 01 02 2.02 01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				9 Dokumen	9 Dokumen	48.879.000	45.379.000	43.979.000	Kab. Garut, Cibatu, Cibatu	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kantor Kecamatan	9 Dokumen	48.376.900	Kecamatan Cibatu
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	%		%	100 %	100 %	22.086.000	48.106.000	32.330.000						100 %	35.563.000	

7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan desa	kali		kali	8 kali	8 kali	8.106.000	8.106.000	8.106.000					8 kali	8.916.600		
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	8.106.000	8.106.000	8.106.000	Kab. Garut, Cibatu, Semua Kelurahan	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	0	1 Laporan	8.916.600	Kecamatan Cibatu
7 01 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Monitoring Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Desa Jumlah Pelaksanaan Monitoring/ Evaluasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dokumen kali	n	Dokumen kali	1 Dokumen 4 kali	1 Dokumen 4 kali	13.980.000	10.000.000	10.000.000					1 Dokumen 4 kali	11.000.000		
7 01 03 2.03 02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				0 Lembaga Masyarakat 260 orang	0 Lembaga Masyarakat 260 orang	13,980,000	10.000.000	10.000.000	Kab. Garut, Cibatu, Semua Kelurahan	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kantor Kecamatan	0 Lembaga Kemasyarakatan 260 orang	11.000.000	Kecamatan Cibatu
		jumlah peserta sosialisasi peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan																
7 01 03 2.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)							0	30.000.000	14.224.000						15.646.400		
7 01 03 2.05 02	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan				1 Dokumen	1 Dokumen	0	30.000.000	14.224.000	Kab. Garut, Cibatu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja		1 Dokumen	15.646.400	Kecamatan Cibatu

														aparatur				
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	%	%	100 %	100 %	159.575.400	169.600.000	160.160.000							100 %	176.176.000	
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	%	%	100 %	100 %	159.575.400	169.600.000	160.160.000							100 %	176.176.000	
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			1 Laporan	1 Laporan	108.000.000	119.600.000	113.020.000	Kab. Garut, Cibatu, Semua Kelurahan	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kecamatan Cibatu	1 Laporan	124.322.000	Kecamatan Cibatu	
7 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			1 laporan	1 laporan	51.575.400	50.000.000	47.140.000	Kab. Garut, Cibatu, Semua Kelurahan	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kecamatan Cibatu	1 laporan	51.854.000	Kecamatan Cibatu	
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan kepada Camat	%	%	100 %	100 %	200.000.000	200.000.000	200.000.000						100 %	220.000.000		
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pelaksanaan Pembinaan Wawasan Kebangsaan	kali	kali	1 kali	1 kali	200.000.000	200.000.000	200.000.000						1 kali	220.000.000		
7 01 05 2.01 08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi			1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000	200.000.000	200.000.000	Kab. Garut, Cibatu, Cibatu	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	7. Peningkatan pelayanan publik	Kantor Kecamatan	1 Dokumen	220.000.000	Kecamatan Cibatu		

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Cibatu Tahun 2023 dilakukan jika terdapat hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Adanya kondisi keuangan daerah yang berubah adanya penambahan, pergeseran dan pengurangan anggaran serta perubahan target kinerja. Yang dalam hal ini di hubungkan pula dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran perubahan renja Kecamatan Cibatu Tahun 2023, maka dirumuskan pula program dan kegiatan beserta indikatornya yang akan di laksanakan pada tahun 2023, dengan memperhatikan pertimbangan antara lain:

1. Mepedomani Perubahan RKPD Kabupaten Garut Tahun 2023 serta perubahan Renstra Kecamatan Cibatu tahun 2019-2024;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Garut;
3. Mendukung prioritas pembangunan daerah tahunan Kabupaten Garut;
4. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Penerapan anggaran berbasis kinerja dan penggunaan sumber-sumber pendanaan yang terukur dalam rangka membayai pelaksanaan program secara efisien dan efektif sesuai ketentuan yang berlaku;
6. Pelaksanaan program dan kegiatan yang di rencanakan harus dapat merespon isu-isu strategis pembangunan daerah Penyusunan perubahan renja pada rumusan program dan kegiatannya mengacu pada visi dan misi Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 dan juga Perubahan Renstra Kecamatan Cibatu yang secara operasional dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023. Visi pembangunan daerah yang

merupakan visi Bupati dan Wakil Bupati Garut terpilih periode tahun 2019-2024 adalah: "Garut yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera "Makna yang terkandung dalam visi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bertaqwa : Terwujudnya masyarakat yang berakhlak mulia, menjunjung nilai-nilai luhur agama dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berlandaskan Pancasila, diindikasikan dengan adanya perubahan perilaku dan budaya dalam lingkungan kehidupan masyarakat;
2. Maju : Terwujudnya Kabupaten Garut sebagai daerah yang mampu menggali, memanfaatkan dan mengelola segenap potensi sumber daya yang dimiliki secara optimal untuk digunakan dalam proses pembangunan sehingga masyarakat memiliki kemampuan dalam membangun struktur ekonomi yang tangguh dan pertumbuhan ekonomi yang bernilai tambah tinggi;
3. Sejahtera : Terwujudnya masyarakat yang sehat, cerdas dan produktif, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta mampu memainkan peran dan fungsi sebagai subjek dan objek dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka dirumuskan misi pembangunan daerah periode tahun 2019-2024 sebagai berikut:

1. Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang agamis, sehat, cerdas dan berbudaya;
2. Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih;
3. Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan serta kemantapan infrastruktur sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan serta fungsi ruang;
4. Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal dan industri pertanian serta pariwisata yang berdaya saing disertai pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Dari keempat misi RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019–2024 tersebut, dijabarkan ke dalam 5 (lima) tujuan dan 17 (tujuh belas) sasaran pembangunan daerah, sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dengan sasaran:

- a. Meningkatnya pengamalan nilai-nilai keagamaan dan budaya daerah;
 - b. Meningkatnya harapan hidup masyarakat;
 - c. Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat;
 - d. Menurunnya kemiskinan dan pengangguran;
 - e. Meningkatnya pengendalian jumlah penduduk
2. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta profesionalisme pelayanan publik, dengan sasaran:
- a. Meningkatnya pelayanan publik yang profesional dan amanah;
 - b. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
3. Meningkatnya penyediaan infrastruktur dasar secara merata dan berkualitas, dengan sasaran:
- a. Meningkatnya aksesibilitas dan mobilitas transportasi menuju pusat-pusat perekonomian;
 - b. Meningkatnya kemajuan pembangunan desa;
 - c. Meningkatnya pemenuhan akses layanan air minum dan sanitasi layak dan berkelanjutan;
 - d. Meningkatnya kualitas perumahan, prasarana dan sarana kawasan pemukiman;
 - e. Meningkatnya pengelolaan irigasi, konservasi dan pengendalian banjir
4. Terwujudnya sumber daya alam dan lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan, dengan sasaran:
- a. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup;
 - b. Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana
5. Meningkatnya perekonomian daerah yang berkualitas dan berdaya saing, dengan sasaran:
- a. Meningkatnya kualitas ketahanan pangan dan gizi masyarakat;
 - b. Meningkatnya pendapatan masyarakat berbasis potensi lokal;
 - c. Meningkatnya realisasi investasi daerah

Tema pembangunan pada RKPD Kabupaten Garut Tahun 2023 yaitu **“Peningkatan Pelayanan Publik Pemerataan Pembangunan dan Daya Saing Daerah serta penguatan demokrasi untuk Kesejahteraan Masyarakat”**, dengan fokus pembangunan pada pemulihan perdagangan, pariwisata, investasi, penguatan perlindungan sosial terutama bagi masyarakat miskin dan masyarakat rentan miskin yang terkena dampak ekonomi akibat dampak pandemi COVID-19, pembangunan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, penguatan pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk mencapai tujuan pembangunan secara berkelanjutan dari pelaksanaan kebijakan pembangunan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024, dalam upaya mewujudkan Kabupaten Garut yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera, yang didukung pilar inovasi, kolaborasi, integrasi dan profesionalisme. Untuk mendukung tujuan, sasaran dan tema pembangunan tersebut, strategi pembangunan daerah dituangkan ke dalam delapan Prioritas Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2023, yaitu :

- PPD 1 : Penurunan angka kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja;
- PPD 2 : Peningkatan Dukungan Kehidupan Beragama, Budaya Gotong Royong, Ketentraman dan Ketertiban serta Politik dan Demokrasi;
- PPD 3 : Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak;
- PPD 4 : Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata;
- PPD 5 : Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa produktif lainnya;
- PPD 6 : Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengurangan risiko bencana;
- PPD 7 : Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur;

PPD 8 : Peningkatan investasi dan pendapatan daerah.

Kecamatan Cibatu Kabupaten Garut sebagai Perangkat Daerah yang menjalankan tugas dan fungsi dalam urusan Pemerintahan yang dilaksanakan pada tahun 2023 terkait dengan pelaksanaan misi kedua yaitu mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelolapemerintahan daerah yang baik dan bersih, dengan tujuan yang terkait adalah meningkatnya kualitas pelayanan publik yang professional dan amanah, serta meningkatnya kualitas pelayanan di tingkat kecamatan.

Perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

Sesuai ketentuan yang tercantum pada Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021.

Atas dasar pertimbangan hal-hal tersebut, maka dirumuskan Tujuan Kecamatan Cibatu Kabupaten Garut sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Garut Nomor 171 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 93 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2019-2024 yaitu:

1. Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik Yang Profesional dan Amanah, dengan indikator :
 - Indek Kepuasan Masyarakat.
2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Tingkat Kecamatan, dengan indikator
 - Persentase Hasil Evaluasi Kinerja Kecamatan.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan Sasaran jangka menengah SKPD Kabupaten Garut memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsinya serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Atas dasar pertimbangan

hal-hal tersebut, maka dirumuskan Sasaran Kecamatan Cibatu Kabupaten Garut sebagaimana telah ditetapkan pada Renstra Perubahan Kecamatan Cibatu Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas Pelayanan di Tingkat Kecamatan, dengan indikator:
 - a. Nilai SKM;
2. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kecamatan, dengan indikator:
 - a. Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan
3. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan, dengan indikator:
 - a. Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Penguasaannya
4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan, dengan indikator:
 - a. Nilai SAKIP Kecamatan

Adapun tujuan, sasaran dan indikator Kecamatan Cibatu dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. 1
Tujuan, sasaran dan indikator kinerja Kecamatan Cibatu Tahun 2023

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional dan amanah	Prosentase pelayanan prima	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan	Nilai Indeks kepuasan masyarakat	80
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Persentase Hasil Evaluasi Kinerja Kecamatan	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	81
			Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	Tingkat Partisipasi Masyarakat	88

			desa dan kelurahan	Dalam BPembangunan	
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	B

Sumber : Perubahan Renstra Kecamatan Cibatu, 2019-2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, maka penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Cibatu Tahun 2023 dikelola melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kementerian Dalam Negeri, dengan rumusan nomenklatur perencanaan dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhirannya sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan untuk selanjutnya akan menjadi acuan dalam penyusunan KUPA-PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Substansi pada Perubahan Renja Tahun 2023 diantaranya yaitu adanya penyesuaian berupa penambahan atau pengurangan kegiatan/subkegiatan; perubahan pagu program, kegiatan atau subkegiatan, serta perubahan indikator dan target indikator program, kegiatan atau subkegiatan. Perubahan ini dilakukan dalam rangka menjawab permasalahan dan mendukung pencapaian target sasaran Renstra tahun 2019-2024 melalui prioritas yang telah ditetapkan dalam Perubahan Renja Tahun 2023. Rekapitulasi rencana program dan kegiatan Perubahan Renja Tahun 2023 disajikan pada tabel 3.2

Tabel 3.2
Rekapitulasi Rencana Program dan Kegiatan Perubahan RENJA Tahun 2023

No	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu
1	Kecamatan Cibatu	Perogram Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja prangkat daerah	Penyusunan dokumen perencanaan	36.514.400
				Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	500.000
				Koordinasi Penyusunan	500.000

No	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu
				Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
				Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	500.000
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	500.000
				Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	500.000
				Evaluasi kinerja perangkat daerah	500.000
			Administrasi Keuangan prangkat daerah	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	1.531.182.969
				Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun	4.514.500
			Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	8.653.500
				Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	5.000.000
			Administrasi umum perangkat daerah	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	11.802.200
				Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	125.041.800
				Penyediaan peralatan rumah tangga	5.721.200
				Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12.634.700
				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	7.455.000
				Fasilitasi kunjungan tamu	16.840.000
				Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	10.640.000
				Penatausahaan arsip dinamis	4.015.000
			Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	21.058.560
				Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	6.640.000
				Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	27.197.900
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di	Peningkatan efektifitas kegiatan pelayanan kepada masyarakat	104.693.000

No	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu
			tingkat kecamatan		
			Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan	43.979.000
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	8.106.000
			Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan	Peningkatan kapasitas lembaga kemaasyarakatan	10.000.000
			Koordinasi dan sinkronisasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM)	Penanganan covid-19 tingkat desa dan kelurahan	14.224.000
		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Sinergitas dengan kepolisian republik Indonesia. Tentara nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	113.020.000
				Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	47.140.000
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai penugasan kepala daerah	Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	200.000.000
		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan aset desa	3.768.200
				Fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan	16.400.000
				Fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa	7.780.000
				Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisiatif	7.828.200
Total		6	14	36	2.456.862.229

Sumber : Hasil Pengolahan data Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023

yang dikelola dalam SIPD.

Secara garis besar rumusan rencana program dan kegiatan pada Perubahan Renja Kecamatan Cibatu Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah program sebanyak 6 program, yaitu :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;

- c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
 - d. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - e. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Desa;
 - f. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
2. Jumlah kegiatan sebanyak 14 kegiatan;
 3. Jumlah sub kegiatan sebanyak 36 subkegiatan;
 4. Jumlah total kebutuhan dana/pagu indikatif untuk rencana pelaksanaan program dan kegiatan pada Perubahan Renja Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 2.456.862.229,-, dengan kronologis dari pagu indikatif pada Renja Tahun 2023 sebesar Rp. 2.628.540.857,- mengalami penyesuaian sebesar Rp. 171.678.628,- pada APBD Murni Tahun 2023 menjadi Rp. 2.456.862.229,-, dan pada Perubahan Renja Tahun 2023 kembali mengalami penyesuaian sebesar Rp. 171.678.628,- menjadi sebesar Rp. 2.456.862.229,-, yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Garut. Adapun rencana program dan kegiatan pada Perubahan Renja Kecamatan Cibatu Tahun 2023 disertai indikator program dan kegiatan serta sumber pendanaan sebagaimana tertuang dalam Sistem Informasi Pemerintahan Darah tersaji pada tabel berikut:

Tabel 3. 3

Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Cibatu Kabupaten Garut Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Cibatu

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Cibatu

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Cata tan Pent ing	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024									
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumb er Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)						
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Targ et					
						Sebelu m	Sesuda h	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah												
7					UNSUR KEWILAYAHAN																		
7	0 1				KECAMATAN													2.628.540.857	2.456.862.229	DAU			2.645.342.500
7	0 1	0 1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													1.998.916.757	1.879.923.829	DAU			2.067.615.200
7	0 1	0 1	2.0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													39.514.400	39.514.400	DAU			43.165.800
7	0 1	0 1	2.0 1	0 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Garut Kec. Cibatu	100%	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	Dokumen Perencanaan	Dokumen Perencanaan	36.514.400	36.514.400	DAU		Persentase Pemenuhan Perencana an Kinerja dan Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan yang tepat waktu	100%	40.165.800	
7	0 1	0 1	2.0 1	0 2	Koordinasi Penyusunan dokumen RKA- SKPD	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD	Kab. Garut Kec. Cibatu	100%	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	Dokumen RKA- SKPD	Dokumen RKA-SKPD	500.000	500.000	DAU		Persentase Pemenuhan Perencana an Kinerja dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu	100%	500.000	

7	01	01	2,01	03	Koordinasi Penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Garut Kec. Cibatu	100%	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen Perubahan RKA-SKPD	500.000	500.000	DAU	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu	100%	500.000
7	01	01	2,01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Tersedianya Doklumen DPA-SKPD	Kab. Garut Kec. Cibatu	100%	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	Dokumen DPA-SKPD	Dokumen DPA-SKPD	500.000	500.000	DAU	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu	100%	500.000
7	01	01	2,01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab. Garut Kec. Cibatu	100%	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen Perubahan DPA-SKPD	500.000	500.000	DAU	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu	100%	500.000

7	01	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisae realisasi kinerja SKPD	Kab. Garut Kec. Cibatu	100%	100%	1 Laporan	1 Laporan	Tersedianya Laporan capaian kinerja dan ikhtisae realisasi kinerja SKPD	Laporan capaian kinerja dan ikhtisae realisasi kinerja SKPD	500.000	500.000	DAU	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu	100%	500.000
7	01	01	2,01	07	Evalulasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Evaluasi kinerja perangkat daerah	Kab. Garut Kec. Cibatu	100%	100%	1 Laporan	1 Laporan	Tersedianya Laporan Evaluasi Kinerja perangkat daerah	Laporan Evaluasi kinerja perangkat daerah	500.000	500.000	DAU	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu	100%	500.000
7	01	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										1.636.510.397	1.535.697.469				1.689.267.100	
7	01	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pemenuhan urusan penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Penerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Garut Kec. Cibatu	100%	100%	14 Orang/Bulan	14 Orang/Bulan	Terlaksananya Penerima Gaji dan Tunjangan ASN	Laporan Penerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.631.295.897	1.531.182.969	DAU	Persentase Pemenuhan urusan penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100%	1.684.301.200

7	01	01	202	02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan Akhir Tahun	Persentase Pemenuhan urusan penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Akhir Tahun SKPD	Kab. Garut Kec. Cibatu	100%	100%	1 Laporan	1 Laporan	Laporan Akhir Tahun SKPD	Laporan Akhir Tahun SKPD	5.214.500	4.514.500	DAU	Persentase Pemenuhan urusan penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100%	4.965.900
7	01	01	205		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											13.653.500	13.653.500				15.018.800
7	01	01	205	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Kab. Garut Kec. Cibatu	100%	100%	29 Stel	29 Stel	Pakaian Dinas Beserta atribut kelengkapannya	Pakaian Dinas Beserta atribut kelengkapannya	8.653.500	8.653.500	DAU	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100%	9.518.800
7	01	01	205	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Tersedianya pegawai yang mengikuti pelatihan	Kab. Garut Kec. Cibatu	100%	100%	1 Orang	1 Orang	Pegawai yang mengikuti pelatihan	pegawai yang mengikuti pelatihan	5.000.000	5.000.000	DAU	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100%	5.500.000
7	01	01	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah											212.329.900	194.149.900				213.564.200
7	01	01	206	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Paket Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Tersedianya Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kab. Garut Kec. Cibatu	100%	100%	1 Paket	1 Paket	Tersedianya Paket Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Paket Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	11.802.200	11.802.200	DAU	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100%	12.982.400
7	01	01	206	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	Tersedianya Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor	Kab. Garut Kec. Cibatu	100%	100%	1 paket	1 Paket	Tersedianya Peralatan dan perlengkapan kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor	125.041.800	125.041.800	DAU	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100%	137.545.900

7	01	01	206	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Peralatan Rumah yang disediakan	Tersedianya peralatan rumah tangga	Kab. Garut Kec. Cibatu	100%	100%	1 Paket	1 Paket	Terlaksananya penyediaan Peralatan Rumah Tangga sesuai kebutuhan	Peralatan rumah tangga sesuai kebutuhan	5.721.200	5.721.200	DAU	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100%	6.293.300
7	01	01	206	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Paket Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Tersedianya Cetak dan penggandaan	Kab. Garut Kec. Cibatu	100%	100%	1 Paket	1 Paket	Cetakan dan Penggandaan sesuai kebutuhan	Cetakan dan Penggandaan sesuai kebutuhan	12.634.700	12.634.700	DAU	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100%	13.898.100
7	01	01	206	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kab. Garut Kec. Cibatu	100%	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	Bahan Bacaan dan peraturan perundangan	Bahan Bacaan dan peraturan perundangan	7.455.000	7.455.000	DAU	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100%	8.200.000
7	01	01	206	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya fasilitas kunjungan tamu	Kab. Garut Kec. Cibatu	100%	100%	1 Laporan	1 Laporan	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan tamu	22.630.000	16.840.000	DAU	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100%	18.524.000
7	01	01	206	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kab. Garut Kec. Cibatu	100%	100%	1 Laporan	1 Laporan	terlaksananya rapat koordinasi	terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	21.840.000	10.640.000	DAU	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100%	11.704.000

7	01	01	206	10	Panatausahaan Arsip dinamis pada SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Panatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Tersedianya Panatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Kab. Garut Kec. Cibatu	100%	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	terlaksananya penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	terlaksananya penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	5.205.000	4.015.000	DAU		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100%	4.416.500	
7	01	01	208		Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah												54.896.460	54.896.460					60.386.000
7	01	01	208	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	tersedianya Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik	Kab. Garut Kec. Cibatu	100%	100%	1 Laporan	1 Laporan	terlaksananya penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	terlaksananya penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	21.058.560	21.058.560	DAU		Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	23.164.400	
7	01	01	208	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	tersedianya penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kab. Garut Kec. Cibatu	100%	100%	1 Laporan	1 Laporan	terlaksananya penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	terlaksananya penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	6.640.000	6.640.000	DAU		Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	7.304.000	
7	01	01	208	02	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor yang disediakan	tersedianya penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Kab. Garut Kec. Cibatu	100%	100%	1 Laporan	1 Laporan	terlaksananya penyediaan jasa pelayanan umum kantor	terlaksananya penyediaan jasa pelayanan umum kantor	27.197.900	27.197.900	DAU		Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	29.917.600	
7	01	01	209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												42.012.100	42.012.100					46.213.300
7	01	01	209		Penyediaan jasa Pemeliharaan,biaya pemeliharaan dan pajak Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	jumlah Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Kab. Garut Kec. Cibatu	100%	100%	13 unit	13 unit	terlaksananya pembayaran pajak kendaraan dinas jabata	terlaksananya pembayaran pajak kendaraan dinas jabata	27.512.100	27.512.100	DAU		Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100%	30.263.300	

7	01	01	2,09		Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Tersedianya gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara	Kab. Garut Kec. Cibatu	100%	100%	3 unit	3 unit	terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	terlaksananya a pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	14.500.000	14.500.000	DAU	Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100%	15.950.000
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK										160.122.900	148.672.000					115.162.300
7	01	02	2,01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan										114.743.900	104.693.000					115.162.300
7	01	02	2,01	02	Peningkatan efektifitas Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh kecamatan	Jumlah laporan Peningkatan Efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	tersedianya laporan pengelolaan PBB, Laporan Pembinaan Pemerintahan Desa, Laporan Lomba Desa, Laporan kegiatan keagamaan, laporan pemuda dan olah raga, laporan pengumpulan data lingkup kesejahteraan, laporan upacara hari besar nasional dan upacara/acara lainnya	Kab. Garut Kec. Cibatu	100%	100%	7 laporan	7 laporan	terlaksananya laporan pengelolaan PBB, Laporan Pembinaan Pemerintahan Desa, Laporan Lomba Desa, Laporan kegiatan keagamaan, laporan pemuda dan olah raga, laporan pengumpulan data lingkup kesejahteraan, laporan upacara hari besar nasional dan upacara/acara lainnya	terlaksananya laporan pengelolaan PBB, Laporan Pembinaan Pemerintahan Desa, Laporan Lomba Desa, laporan pemuda dan olah raga, laporan pengumpulan data lingkup kesejahteraan, laporan upacara hari besar nasional dan upacara/acara lainnya	114.743.900	104.693.000	DAU	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh kecamatan	100%	115.162.300
7	01	02	2,02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada dikecamatan										45.379.000	43.979.000					48.376.900
7	01	02	2,01	01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada masyarakat di kecamatan	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan	Tersedianya dokumen perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat	Kab. Garut Kec. Cibatu	100%	100%	9 dokumen	9 dokumen	dokumen perencanaan pelayanan kepada masyarakat	dokumen perencanaan pelayanan kepada masyarakat	45.379.000	43.979.000	DAU	Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang dapat diberdayakan		48.376.900
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN										48.106.000	32.330.000					35.563.000
7	01	03	2,01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa										8.106.000	8.106.000					8.916.600

7	013	2,01	01	Peningkatan Efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang dapat diberdayakan	Jumlah laporan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Tersedianya Laporan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Kab. Garut Kec. Cibatu	100%	100%	1 Laporan	1 Laporan	Laporan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Laporan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	8.106.000	8.106.000			Persentase Masyarakat Desa yang dapat diberdayakan	100%	8.916.600	
7	013	2,03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan												10.000.000	10.000.000					11.000.000
7	013	2,01	02	Peningkatan Kapasitas lembaga Kemasyarakatan	Persentase Masyarakat Desa yang dapat diberdayakan	jumlah Peserta Sosialisasi peningkatan Kapasitas lembaga kemasyarakatan	Tersedianya peserta sosialisasi peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan	Kab. Garut Kec. Cibatu	100%	100%	260 orang	260 orang	terlaksananya sosialisasi peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan	terlaksananya sosialisasi peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan	10.000.000	10.000.000	DAU		Persentase Masyarakat Desa yang dapat diberdayakan	100%	11.000.000	
7	013	2,05		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat												30.000.000	14.224.000					15.646.400
7	013	2,05	02	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Persentase Masyarakat Desa yang dapat diberdayakan	Jumlah dokumen Penanganan Covid-19 di tingkat desa dan kelurahan	tersedianya dokumen penanganan covid-19 di tingkat desa dan kelurahan	Kab. Garut Kec. Cibatu	100%	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	terlaksananya penanganan covid-19 di tingkat desa dan kelurahan	terlaksananya penanganan covid-19 di tingkat desa dan kelurahan	30.000.000	14.224.000	DAU		Persentase Masyarakat Desa yang dapat diberdayakan	100%	15.646.400	
7	014			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM												169.600.000	160.160.000					176.176.000
7	014	2,01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum												169.600.000	160.160.000					176.176.000

7	014	2,01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara nasional Indonesia dan instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah indonesia	tersedianya Laporan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah indonesia	Kab. Garut Kec. Cibatu	100%	100%	1 Laporan	1 Laporan	terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah indonesia	terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah indonesia	119.600.000	113.020.000	DAU	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100%	124.322.000
7	014	2,01	02	Harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	tersedianya laporan pelaksanaan MTQ	Kab. Garut Kec. Cibatu	100%	100%	1 Laporan	1 Laporan	terlaksananya kegiatan MTQ	terlaksananya kegiatan MTQ	50.000.000	47.140.000	DAU	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100%	51.854.000
7	015			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM											200.000.000	200.000.000				220.000.000
7	015	2,01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Sesuai Penugasan Kepala Daerah											200.000.000	200.000.000				220.000.000
7	015	2,01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan kepada camat	Jumlah Dokumen Tugas Forum koordinasi pimpinan di Kecamatan	Tersedianya dokumen tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	Kab. Garut Kec. Cibatu	100%	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	Terlaksananya Forum Koordinasi pimpinan di kecamatan	Terlaksananya Forum Koordinasi pimpinan di kecamatan	200.000.000	200.000.000	DAU	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan kepada camat	100%	220.000.000
7	016			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA											51.795.200	35.776.400				30.826.000
7	016	2,01		Fasilitasi , Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa											51.795.200	35.776.400				30.826.000
7	016	2,01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa	Persentase Desa berkinerja baik	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan	Tersedianya fasilitas pengelolaan keuangan desa dan aset desa	Kab. Garut Kec. Cibatu	100%	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	terlaksananya fasilitas pengelolaan keuangan desa dan aset desa	terlaksananya fasilitas pengelolaan keuangan desa dan aset desa	7.146.000	3.768.200	DAU	Persentase Desa berkinerja baik	100%	4.145.000

7	016	201	04	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Desa berkinerja baik	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Garut Kec. Cibatu	100%	100%	2 Laporan	2 Laporan	Terlaksananya Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-undangan	16.821.000	16.400.000	DAU	Persentase Desa berkinerja baik	100%	18.040.000
7	016	201	06	Fasilitasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Persentase Desa berkinerja baik	Jumlah Dokumen fasilitasi dalam rangka pemilihan kepala desa	tersedianya Fasilitasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kab. Garut Kec. Cibatu	100%	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	Terlaksananya fasilitasi pemilihan kepala desa	Terlaksananya fasilitasi pemilihan kepala desa	20.000.000	7.780.000	DAU	Persentase Desa berkinerja baik	100%	-
7	016	201	13	Fasilitasi penyusunan perencanaan Pembangunan Partisipatif	Persentase Desa berkinerja baik	Jumlah Dokumen Sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	tersedianya dokumen Fasilitasi penyusunan perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kab. Garut Kec. Cibatu	100%	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	Terlaksananya Fasilitasi penyusunan perencanaan Pembangunan Partisipatif (Musrembang)	Terlaksananya Fasilitasi penyusunan perencanaan Pembangunan Partisipatif (Musrembang)	7.828.200	7.828.200	DAU	Persentase Desa berkinerja baik	100%	8.641.000
TOTAL														2.628.540.857	2.456.862.229				2.645.342.500	

Sumber : RKPD Perubahan, SIPD 2023

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Cibatu Kabupaten Garut Tahun 2023, disusun sebagai penyesuaian terhadap adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi perencanaan yang telah ditetapkan pada RKPD dan atau Renja sebelumnya yang mencakup perubahan asumsi ekonomi makro yang telah disepakati terhadap kemampuan fiskal daerah, sehingga terjadinya pelampauan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan, serta pendanaan kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya harus ditingkatkan dari yang telah ditetapkan serta dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan.

Perubahan Renja Tahun 2023 juga dilakukan untuk merespon terjadinya i) kejadian luar biasa seperti Kejadian Luar Biasa (KLB) Difteri di Kecamatan Pangatikan; ii) kejadian bencana alam seperti hibah rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi; rehabilitasi pasca bencana gempa bumi di Kecamatan Samarang dan Pasirwangi; dukungan kegiatan prioritas nasional diantaranya kegiatan dukungan penanganan stunting di KODIM dan POLRES, pembangunan pasar rakyat Cikajang, pengelolaan Situ Bagendit; iv) pengalokasian gaji PPPK Kesehatan; v) penyesuaian belanja pemenuhan DAU yang diarahkan penggunaannya terutama DAU Bidang Pendidikan dan DAU Bidang Kesehatan; v) penyesuaian atas petunjuk DAK Fisik dan Non Fisik serta adanya kegiatan lunturn dan pergeseran anggaran SKPD.

Selain itu pula, penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2023 ini, dilakukan untuk memberikan landasan yuridis dalam keadaan yang menyebabkan harus dilakukannya pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, sekaligus sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kabupaten Garut.

Perubahan RKPD yang disepakati harus menjadi acuan bagi Perangkat Daerah maupun masyarakat termasuk dunia usaha sehingga tercapai sinergitas dalam pelaksanaan program pembangunan. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Bagi Perangkat Daerah, Perubahan RKPD Tahun 2023 merupakan pedoman atau dasar penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Penentuan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP), serta sebagai acuan dalam proses penyusunan Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-RAPBD) Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2023.
2. Untuk mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi, dan harmonisasi pelaksanaan setiap program, maka dalam rangka koordinasi perencanaan masing-masing instansi daerah perlu menyusun Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023.
3. Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, setiap Perangkat Daerah melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan, melakukan tindakan koreksi yang diperlukan dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala 3 (tiga) bulanan kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pada akhir Tahun Anggaran 2023, setiap Perangkat Daerah wajib melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan meliputi evaluasi pencapaian sasaran kegiatan, maupun kesesuaiannya dengan rencana anggaran yang ditetapkan dalam APBD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dalam rangka pencapaian sasaran program-program yang direncanakan dalam Perubahan Renja ini, maka seluruh jajaran pemerintahan hendaknya menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya. Pelaksanaan semua kegiatan, baik dalam “kerangka regulasi” maupun dalam “kerangka anggaran” (*budget intervention*), penting untuk memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik diantaranya kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan peran/tanggung jawab/tugas yang melekat pada masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN